

**KEKALAHAN PARTAI KOALISI MERAH PUTIH PADA PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 DI
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh :

Welliam Harvey

Dosen Pembimbing : Adlin S.Sos, M.Si

e-mail : harveywelliam@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax.0761-63277

Abstract

In 1945 Article 6A Paragraph 2 Candidate Pair of President and Vice President shall be nominated by a Political Party or a coalition of political parties prior to the General Election General Election. In this case the electoral system is an important factor. Therefore, the authors intend to conduct research with the aim to explain the defeat of the Coalition Party Red and White in the election of President and Vice President of the Republic of Indonesia in 2014 in the district of the Land Army Logas Regency Kuantan Singingi and the factors that influence it.

The location of this research is the District Land Army Logas Singingi Regency Kuantan. This study includes qualitative research, with data collection techniques interview, documentation, and research informants determined by purposive sampling technique. In this study, the theory used is derived from the theory proposed by Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, Personal Toto, H.Anto Djawamaku, and James Buchanan regarding the cause of divisions and conflicts within the political parties and coalitions of parties. Results of this study concluded that the defeat of the Coalition Party Red and White in the election of President and Vice President of the Republic of Indonesia in 2014 in the district of the Land Army Logas Regency Kuantan Singingi due to a lack of coordination elite and elite coalition center coalition led to overlapping areas of interest between the central elite with elite area, lack of campaign funds, discriminatory policies and voters focused imaging media.

Keywords: Presidential Election, The Coalition Red and White

PENDAHULUAN

Di dalam UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.¹ Dalam hal ini sistem pemilihan merupakan faktor yang penting. Dikebanyakan negara seperti di Indonesia Pemilihan Umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari Demokrasi. Hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa Pemilihan Umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan Politik dan Lobbying.²

Pentingnya berserikat dapat dilihat dari banyaknya Partai Politik yang ada di Indonesia, apalagi satu-satunya cara untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia harus melalui Partai Politik. Tak salah jika hampir semua orang kaya, pintar dan berkepentingan ingin menjadi bagian dari Partai-Partai yang memiliki massa besar di Indonesia untuk mendapatkan kekuasaan yang nantinya kepentingan - kepentingannya dan golongannya dapat terpenuhi. Pada sistem multi partai dimana kekuatan politik terdistribusi kedalam banyak partai dan besaran kekuatan partai menjadi sumberdaya penting dalam

koalisi. Kepemilikan sumber daya partai akan menentukan posisi partai dalam koalisi dan formasi koalisi terbentang dalam pemenuhan mayoritas jumlah dan ideologi. Yang paling memengaruhi terbentuknya dan bertahannya koalisi adalah motif koalisi yang didorong oleh multimotif, secara garis besar motif dalam koalisi meliputi mencari efisiensi, pemegang kontrol, dan mengamankan diri. Maka sistem koalisi akan menguntungkan partai kecil yang finansialnya lemah karena akan terbantu oleh partai yang mapan, dilain sisi partai yang besar akan menjadi penguasa kebijakan di dalam koalisi akibat lebih menonjol daripada partai lainnya yang ada didalam koalisi. Dengan adanya sistem koalisi, partai yang menang pada Pemilihan Umum Presiden juga akan terbantu karena dapat membagi-bagi kekuasaan kepada anggota koalisinya saja yang bertujuan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak mendapat penolakan dari partai lain dan berkesempatan besar untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dibangun dengan koalisi.³

Pada 9 April 2014 Republik Indonesia melakukan Pemilihan Umum Legislatif yang di ikuti oleh 12 (dua belas) partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai kontestan yang berhak memperebutkan suara rakyat Republik Indonesia. Nantinya partai-partai inilah yang berkompetisi memperebutkan kursi Presiden Republik Indonesia yang mana setiap partai diwajibkan memiliki 3,5% (tiga setengah perseratus) dari total suara sah nasional hasil Pemilu Legislatif terlebih dahulu yang

¹ Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945

² Miriam Budiardjo "Dasar -Dasar Ilmu Politik" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 461

³ Sigit Pamungkas "PARTAI POLITIK" Teori dan Praktik di Indonesia (Yogyakarta, Sleman: Institute for Democracy and Welfarism , 2012) hlm. 78 - 79

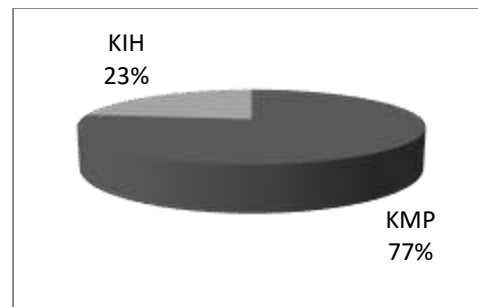
ditentukan ambang batas Electoral Threshold.

Ada sejumlah syarat, baik administratif maupun substansial, yang harus di penuhi oleh setiap partai untuk bisa menjadi peserta Pemilihan Umum, teteapi permasalahan utamanya tetap pada Electoral Threshold yang mewajibkan partai memperoleh sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah perseratus) dari perolehan suara sah Legislatif secara Nasional.⁴ Maka dengan banyaknya syarat untuk menjadi partai yang ikut berpartisipasi pada Pemilu Presiden maka harus terlebih dahulu memperoleh suara minimal 3,5% (tiga setengah perseratus) dari suara sah Nasional Pemilu DPR dan selanjutnya dapat berkoalisi jika tidak mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah Nasional Pemilu DPRD. Maka terbentuklah koalisi yang bernama Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dimana Koalisi Merah Putih beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrasi Rakyat yang masih setengah-setengah. Sedangkan di Koalisi Indonesia Hebat hanya ada empat partai, yaitu: PDI-Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat. Pada tanggal 14 juli 2014, 6 (enam) dari 10 (sepuluh) partai yang akan berpatisipasi di Pemilu Presiden sepakat untuk mendirikan koalisi yang di beri nama Koalisi Merah Putih, yang merupakan hasil Lobby Politik dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai masing-masing yang menyatakan satu misi dan satu visi yang menghasilkan tujuan utamanya untuk mendukung H. Prabowo Subianto dan

⁴ Miriam Budiardjo "Dasar -Dasar Ilmu Politik" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2008) hlm. 488

Ir.H.M, Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014.

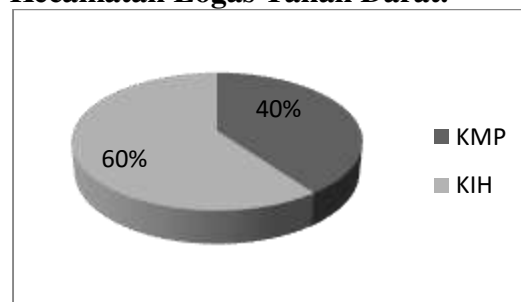
Diagram : Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: KPUD Kuantan Singingi

Dapat dilihat bahwa Kecamatan Logas Tanah Darat masih merupakan basis dari koalisi merah putih dengan perolehan suara terbanyak hingga mencapai 77% (tujuh puluh tujuh perseratus) dan kemenangan partai-partai yang menjadi aliansi koalisi merah putih. Sedangkan koalisi indonesia hebat memperoleh suara terbanyak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana suara terkecil mejadi milik partai hanura. Sedangkan perolehan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kecamatan Logas Tanah Darat dapat dilihat pada diagram berikut:

Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Logas Tanah Darat.



Sumber: KPUD Kuantan Singingi

Dapat di lihat dari diagram di atas, telah terjadi suatu dinamika politik yang terjadi pada elite partai politik pusat dan daerah dalam mencapai tujuan bersama yang merupakan ideologi partai politik dan koalisi untuk menyukseskan atau memenangkan Prabowo Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dimana Koalisi Merah Putih yang pada Pemilihan Umum DPR meraih suara hingga 77% (tujuh puluh tujuh perseratus) justru mengalami kekalahan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dimana hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini mejadi konflik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, yang mana kedua kubu saling serang dengan spekulasi-spekulasi tentang suara yang tidak sah. Namun banyak pihak yang mendukung agar kedua koalisi saling mendukung dan bisa menyatukan kembali masyarakat loyalis mereka yang mana telah sebelumnya terjadi dualisme, atau Pro Koalisi Merah Putih dan Pro Koalisi Indonesia Hebat.

Maka dengan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Kekalahan Partai Koalisi Merah Putih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Apa penyebab kekalahan Koalisi Merah Putih di Kecamatan Logas Tanah Darat?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk menjelaskan penyebab kekalahan Koalisi Merah Putih di Kecamatan Logas Tanah Darat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014.

Sedangkan kegunaannya adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan bahan evaluasi bagi pembaca maupun peneliti, dan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kebijakan oleh aparat pemerintah dan instansi yang terkait.

Menurut **Mark N.Hugopian** mendefenisikan Partai Politik adalah suatu organisasi yang di bentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, tampak jelas bahwa basis sosiologis dari suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang di arahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.⁵

Partai Politik menurut **Ichlasul Amal** adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Partai Politik merupakan suatu organisasi , Partai Politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan

⁵ Ichlasul Amal “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik” (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2012) hlm. xv

sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (Legitimate) dan damai.⁶

Miriam Budiardjo, Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.⁷ Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.⁸

Sedangkan **Sigmund Neumann** mengartikan Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Menurut Neumann, Partai Politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.⁹

Carl J. Friedrich Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.¹⁰ Sedangkan

Giovanni Sartori menyatakan Partai Politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti Pemilihan Umum dan melalui Pemilihan Umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan Publik.¹¹

Heywood, Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah.¹²

Gamson seperti dikutip **Hinckley**, Penggunaan sumberdaya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit. Pengikatan koalisi dilakukan oleh para aktor dengan tawar menawar menciptakan berbagai kemungkinan kontrak politik tentang bagaimana bentuk koalisi maupun pemutusan kerjasamanya. Penyatuan motif dan ketrampilan berpolitik kemudian menjadi titik penting dalam koalisi, sebab ia dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik diantara patner koalisi agar semua pihak memperoleh hasil yang maksimal.¹³

Menurut **Daniel S. Lev** Organisasi-organisasi kemasyarakatan negara berkembang umumnya terpilah-pilah menurut alur pengelompokan primordial atas dasar suku, bahasa, dan agama. Dalam masyarakat yang demikian ini, perbedaan fundamental yang memisahkan para anggotanya akan merembet ke dalam struktur Partai Politik yang dengan kecanggungan

⁶ Ichlasul Amal "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik" (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2012) hlm.xv

⁷ Miriam Budiardjo "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 397

⁸ Ibid hlm. 404

⁹ Ibid

¹⁰ ibid

¹¹ Ibid hlm 404 - 405

¹² Sigit Pamungkas "PARTAI POLITIK" Teori dan Praktik di Indonesia (Yogyakarta, Sleman: Institute for Democracy and Welfarism , 2012) hlm. 78

¹³ Ibid

teknik dan keorganisasiannya mengeksploitasi perbedaan dan konflik tersebut untuk memperoleh kekuasaan.¹⁴

Ichlasul Amal, Organisasi Partai Politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara absah dan damai.¹⁵

Menurut **Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi** Perpecahan dalam Partai Politik bisa disebabkan tiga hal: 1) Perbedaan ideologi dari para anggotanya. 2) Perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan. 3) Persaingan kepemimpinan dalam partai.¹⁶

Sedangkan menurut **H. Anto Djawamaku** Ada beberapa macam konflik internal dalam tubuh Partai Politik, yaitu:

1. Karena partai tidak memiliki platform yang jelas, sehingga mengakibatkan tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai.
2. Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya figur pemimpin Partai

¹⁴ Ichlasul Amal "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik" (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2012) hlm xix -xx

¹⁵ Ichlasul Amal "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik" (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012) hlm. xv

¹⁶ Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi "Sistem Politik Indonesia"(Jakarta, Karunika UT: 1995) hlm 5.6

Politik berpotensi mematkan kaderisasi di tubuh Partai Politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap mampu menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti.

3. Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul tokoh baru dalam partai politik menunjukkan kegagalan Partai Politik melakukan reformasi internal, terutama untuk revitasisasi dan regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi.¹⁷

Dan menurut **James Buchanan** Teori Pilihan Rasional adalah sebuah pilihan yang rasional jika seseorang terjun ke dunia politik, terutama untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.¹⁸

Penelitian yang akan dilakukan merupakan sebuah penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif melalui berbagai tahapan berfikir kritis-ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berfikir secara induktif, yaitu

¹⁷ Sitompul, Chudry S.H, M.H "Jurnal HTN dan PUU : Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multi Partai di Indonesia" www.Kemenkumham.go.id (April 2010)

¹⁸ Nugroho, SBM, SE, MSP. "Memahami Perilaku Politik Lewat Teori Ekonomi Politik" (Suara Merdeka september 2004).

menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian disebabkan masih rendahnya masyarakat yang memiliki akta kelahiran.

Data primer yaitu, data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang telah diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar, majalah maupun literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam menentukan informan selanjutnya ditentukan dengan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan yang ahli dibidangnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara yaitu teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap informan untuk mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan Dokumentasi Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik

dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik

Setelah seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka informasi tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yakni informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara yang lain, hasil wawancara dengan teori dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ditambahkan dengan data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Perilaku Kepala Daerah Menjadi Ketua Tim Kampanye

Kekalahan Koalisi Merah Putih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 di Kecamatan Logas Tanah Darat dapat terjadi akibat peran Kepala Daerah yang menjadi ketua koalisi tidak bekerja maksimal dikarenakan ada kepentingan politik lain dari hasil pemenang Pemilu Presiden. Keterlibatan Kepala Daerah dalam politik Pemilu Presiden tidak terjadi kali ini saja, tentu alasan kuat Kepala Daerah ikut berpolitik karena mereka memiliki kekuasaan yang dapat memobilisasi perangkat reformasi birokrasi di daerah hanya untuk memenangkan salah satu calon. Tentu harapan DPP pusat kepada kepala daerah sangat besar karena dapat memberi kontribusi yang besar kepada kemenangan Prabowo-Hatta.

Sedangkan pada Pemilu Presiden tahun 2014 ini, Kepala Daerah

yang merupakan kader Partai Golkar merupakan para pendukung yang hanya diwajibkan oleh partai mereka untuk mendukung calon Presiden Prabowo-Hatta, tak terkecuali Gubernur Riau Annas Maamun yang juga menjabat Ketua DPD Tingkat I Riau. Pada awalnya Gubernur Riau mendeklarasikan dukungan kepada calon Prabowo-Hatta seperti Kepala Daerah lainnya yang bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Tetapi kenyataannya Annas Maamun mulai tidak sejalan dengan koalisi Merah Putih karena memberikan jabatan Ketua Koalisi Merah Putih kepada wakilnya di pemerintahan Arsyadjuandi Rachman. Hal tersebut jelas membuat anggota Koalisi Merah Putih di Riau merasa bahwa Gubernur Riau tersebut telah menyalahgunakan wewenang sebagai ketua Koalisi Merah Putih, seharusnya Gubernur Riau menjalankan perintah DPP dan dapat membantu kemenangan Prabowo-Hatta.

B. Perbedaan Ideologi Dan Kepentingan Dari Elit Koalisi Di Daerah.

Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Dan merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya. Dengan demikian sebuah partai politik harus mempunyai ideologi yang membangun bangsa dan negara mencapai masyarakat adil dan makmur harus didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Tentu hal ini merupakan landasan yang merupakan pertimbangan untuk bergabung dengan koalisi tertentu. Pada pemilu tahun 2014 ini tidak banyak partai politik yang sanggup mencapai ambang batas,

sehingga diharuskan untuk berkoalisi dengan partai lain.

Dengan di bentuknya koalisi partai politik, maka lahirlah Koalisi Merah Putih yang memiliki tujuan memenangkan calon Presiden Prabowo-Hatta dalam pemilu presiden tahun 2014. Partai-partai yang bergabung dengan Koalisi Merah Putih adalah partai-partai yang memiliki ideologi yang sama, akan tetapi dalam perjalannya ternyata banyak ideologi dari para anggota partai tidak sama akibat memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Perbedaan ideologi dan kepentingan ini terjadi di elite partai pusat maupun daerah. Di Provinsi Riau partai-partai yang memiliki ideologi yang sama adalah partai Gerindra dengan tujuan kemenangan calon Prabowo-Hatta, Partai Amanat Nasional dengan tujuan kemenangan Prabowo-Hatta, Partai Keadilan Sejahtera dengan tujuan kemenangan Prabowo-Hatta, Partai Demokrat dengan tujuan kemenangan Prabowo-Hatta, Partai Persatuan pembangunan dengan tujuan kemenangan Prabowo-Hatta, tetapi berbeda dengan Partai Golkar yang merupakan ketua Koalisi Merah Putih di Riau. Partai Golkar di sebut-sebut memiliki ideologi yang berbeda dengan partai lainnya dengan mendukung calon Jokowi-JK.

C. Manajemen Tim Kampanye Yang Buruk

Manajemen adalah gabungan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu yang di tentukan. Manajemen juga dapat berarti sebagai perpaduan pelaksanaan fungsi-fungsi rencana bagi organisasi untuk cara bagaimana cara

mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Pada Pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2014, manajemen tim kampanye Koalisi Merah Putih yang buruk merupakan salah satu penyebab kalahnya Koalisi Merah Putih di Kecamatan Logas Tanah Darat.

Manajemen tim kampanye Koalisi Merah Putih yang buruk sudah terlihat dari tingkat Provinsi Riau yang mengakibatkan tidak adanya koordinasi sesama anggota partai Koalisi Merah Putih dan tidak ada kampanye calon Prabowo-Hatta, hal ini disebabkan oleh kepemimpinan Annas Maamun sebagai ketua tim kampanye Koalisi Merah Putih di Riau. Seharusnya seorang pemimpin harus mampu menyatukan partai koalisi untuk segera melaksanakan program-program yang akan dilakukan oleh partai Koalisi Merah Putih, akan tetapi Annas Maamun tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin karena telah gagal dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen.

D. Minimnya Dana Kampanye.

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam Pemilu Kepala Daerah maupun Presiden. Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di Tv, Radio, dan media-media lain, oleh karena itu, kandidat sering mencurahkan banyak

waktu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya. Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan adanya kesulitan yang besar dalam membuat sistem yang efektif untuk melakukan pendanaan terhadap partai-partai sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan dana. Banyak negara telah mengalami malapraktik dalam pengadaan dana kampanye yang disediakan pihak tertentu akibat terdapatnya perjanjian imbalan bagi pemberian dana kampanye, serta sejumlah besar saluran lainnya yang melibatkan BUMN. Privatisasi umumnya disediakan berdasarkan janji dan hak-hak kontrol di semua tingkat pemerintahan. Namun, pengalaman dunia internasional menunjukkan bahwa penyumbangan dana kampanye partai politik dapat berjalan dengan efektif apabila dirancang dengan baik, didukung oleh sanksi yang efektif, dan disertai oleh Regulasi-regulasi dana kampanye partai politik.

Pada pemilu presiden tahun 2014 di Indonesia, tentu kita akan memikirkan akan ada kampanye calon-calon Presiden di daerah kita, seperti di daerah Riau Kabupaten Kuantan Singingi. Tentu kampanye tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemilu, apalagi seperti Pemilu Presiden yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi kegiatan kampanye yang di tunggu masyarakat sebagai hiburan pada saat pemilu tidak pernah ada, apalagi masyarakat juga mendapat sosialisasi dari acara kampanye tersebut. menurut hasil wawancara peneliti dengan informan tidak adanya kampanye di akibatkan karena tidak memiliki dana kampanye.

E. Kebijakan Diskriminatif Dalam Pemilihan Saksi

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan yang dilakukan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Sedangkan diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Diskriminasi di tempat kerja berarti mencegah seseorang memenuhi aspirasi profesional dan pribadinya tanpa mengindahkan prestasi yang dimilikinya.

Pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kecamatan Logas Tanah Darat, banyak kader-kader dari partai Koalisi Merah Putih kecewa akibat DPP Koalisi Merah Putih memilih saksi untuk penghitungan suara Pemilu Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera. Padahal sebelumnya mereka merupakan saksi

pada saat Pemilu Presiden maupun pilkada, akan tetapi peran mereka tergantikan ketika mereka merasa pekerjaan tersebut adalah profesi mereka. Hal ini pun akhirnya menjadi masalah akibat mereka merasa suaranya tidak di dengarkan oleh DPP. akibatnya mereka tidak mau melakukan kegiatan politik dalam hal membantu pemenangan Prabowo-hatta. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang di buat DPP Koalisi Merah Putih merupakan kebijakan diskriminatif karena kebijakan tersebut mencega seseorang memenuhi aspirasi profesionalnya dan pribadinya tanpa mengindahkan prestasi yang dimilikinya. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan tersebut dimana saksi yang di pilih tidak merata dari semua partai koalisi dan hanya di pilih dari partai Keadilan sejahtera saja.

F. Pemilih Yang Terfokus Pencitraan Media

Jika kita berbicara mengenai strategi pencitraan, tak dapat dilepaskan dari peran media massa dalam kapasitasnya sebagai media wadah untuk memberitakan kepada publik serta memberi citra dari aktivitas para aktor politik yang diberitakan dan menjadi konsumsi pemilih. Peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan. Hal ini pun tidak di sia-siakan oleh para aktor politik untuk pencitraan. Para aktor politik yang melakukan strategi pencitraan senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar aktivitas politiknya memperoleh liputan dari media.

Pada Pemilu Presiden tahun 2014, media massa sangat berpengaruh besar atas tidak berfungsinya peran tim kampanye Koalisi Merah Putih di Kecamatan Logas Tanah Darat. Hal ini

terjadi akibat pencitraan media kepada salah satu calon yang nilai-nilai atau pesan dari media tersebut telah mempengaruhi pemilih. Dengan adanya informasi politik yang disajikan melalui media massa masyarakat menjadi tahu mengenai realitas dan perkembangan isu politik yang berkembang yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Karena masyarakat yang sangat peka terhadap isu-isu politik terutama pada media massa akhirnya akan terfokus kepada pencitraan. Sebenarnya masyarakat memang telah meresap nilai-nilai yang di berikan oleh media massa, sehingga masyarakat memiliki penilaian-penilaian tertentu tentang calon-calon presiden. Dalam hal ini masyarakat telah terfokus kepada pencitraan saja, tetapi tidak pernah mengolah nilai-nilai dan informasi yang di terima. Akibat peran media tersebut, hampir seluruh kader partai yang menjadi tim kampanye mengeluh akibat pencitraan media massa yang sangat efektif dalam merubah aspirasi masyarakat terhadap calon presiden. Mereka juga berpendapat pengaruh media massa sangat menentukan kemenangan dalam Pemilu Presiden tahun 2014 ini. Apalagi masyarakat memang mendambakan sosok pemimpin yang sederhana seperti Jokowi.

Dari hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan bahwa Koalisi Merah Putih di Riau khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi belum terbentuk akibat tidak memiliki dana kampanye dan pengelolaan yang buruk dari Koalisi Merah Putih Provinsi Riau. Dimana tidak ada aktifitas koalisi yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang Kekalahan Partai Koalisi Merah Putih Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan faktor yang menyebabkan kalahnya partai koalisi merah putih, adalah kurangnya koordinasi elite koalisi pusat dan elite koalisi daerah menyebabkan timpang tindih kepentingan antara elite pusat dengan elite daerah, begitu juga antara elite daerah dengan elite daerah lainnya. Kepentingan-kepentingan dari para elite di daerah menyebabkan elite-elite daerah tidak berkomitmen menjadi ketua tim kampanye yang juga mengakibatkan buruknya manajemen tim kampanye yang di kelola oleh Kepala Daerah.
2. Minimnya dana kampanye juga akan menyebabkan tidak terpenuhinya aspirasi dari tim kampanye di daerah yang tidak dapat mengakomodasi keinginan masyarakat. Ditambah banyaknya kebijakan diskriminatif tentu akan tetap berpotensi memperburuk hubungan sesama partai koalisi hingga internal partai, sedangkan kebijakan memilih saksi dari PKS yang merupakan permintaan dari calon Presiden banyak membuat kader di daerah kecewa dan menyayangkan hal tersebut.
3. Masyarakat yang terfokus kepada media massa dalam menentukan pilihannya, masyarakat juga tidak membandingkan apa yang di ketahui dari media massa dengan yang lainnya akibat tidak memiliki

referensi yang cukup dan masyarakat memang sudah membudayakan opini publik sebagai referensinya dalam kegiatan politik seperti pemilu.

Sumber Lain :

Maulida ,Wulan Peneliti The Political Literacy Institute, “Partai Politik Peserta Pemilu 2014” Koran Sindo Edisi Minggu 18 Mei 2014.

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang No 42 Tahun 2008

DAFTAR PUSTAKA

Amal, Ichlasul. *“Teori – Teori Mutakhir Partai Politik”* Yogyakarta : Tiara Wacana, mei 2012.

Budiardjo, Miriam. *“Dasar – Dasar Ilmu Politik”* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Agustus 2014.

Djawamaku, H. Anto dikutip dari Dedy Panggabean. Jurnal *“Analisis Perpecahan Di Tubuh Golkar Dengan Pendekatan Teori Manajemen Konflik”* 2012.

Katz, S. Richard dan Crotty William. *“handbook Partai Politik”* Bandung : Nusa Media, Agustus 2014.

Mukthie Fadjar, Abdul. *“Partai Politik dalam perkembangan Ketatanegaraan Indonesia”* Malang : Setara Press, Oktober 2012.

Pamungkas, Sigit. *“Partai Politik – Teori dan Praktik di Indonesia”* Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism, Januari 2012.

Sjamsuddin Nazaruddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi *“Sistem Politik Indonesia”*(Jakarta, Karunika UT: 1995) hlm 5.6

Sugiyono. *“Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”* Bandung :Alfabeta, 2011

Thoha, Miftah. *“Birokrasi dan Politik di Indonesia”* Jakarta: Rajawali Press, September 2012.